



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

RENCANA KERJA TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



☎ 0751 - 7054555, 7054374

🌐 bappeda.sumbarprov.go.id

📍 Jl. Khatib Sulaiman No. 1
Padang-Sumatera Barat





GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional, menjadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri dari:
 1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
4. Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
5. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
6. Rencana Kerja RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi;
7. Rencana Kerja RSJ Prof. HB. Sa'anin Padang
8. Rencana Kerja RSUD Mohammad Natsir Solok;
9. Rencana Kerja RSUD Pariaman;
10. Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
11. Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
12. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
13. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Rencana Kerja Dinas Sosial;
15. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
16. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. Rencana Kerja Dinas Pangan;
18. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
19. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
20. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
21. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
22. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
23. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
24. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
26. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan;
27. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
28. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
29. Rencana Kerja Dinas Pariwisata;

30. Rencana Kerja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 31. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 32. Rencana Kerja Dinas Kehutanan;
 33. Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 34. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 35. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 36. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
 37. Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 38. Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan;
 39. Rencana Kerja Badan Penghubung;
 40. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 41. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 42. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah; dan
 43. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

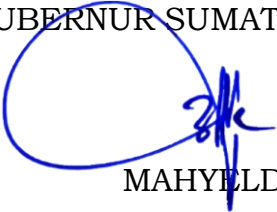
- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengalami penyesuaian baru atas usul Perangkat Daerah, dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 September 2024
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2024
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

43. RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Renja Bappeda merupakan dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Renja Bappeda Tahun 2025 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Bappeda dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan target capaian kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025.

Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi aparatur di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, sehingga optimalisasi target-target kinerja perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita dalam melanjutkan pembangunan menuju Sumatera Barat yang lebih baik, maju dan bermartabat.

Padang, 31 Juli 2024
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,



MEDI ISWANDI, ST, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	57
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	58
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	62
3.3 Program dan Kegiatan	64
3.4 Mitigasi Risiko	80
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	86
4.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	86
4.2 Pendanaan	90
BAB V PENUTUP	91
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	91
5.2 Rencana Tindak Lanjut	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	7
Tabel 2.1.2	Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 s.d Tahun Berjalan Tahun 2024	20
Tabel 2.2.1	Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2023	36
Tabel 2.3.1	Pemetaan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat	37
Tabel 2.3.2	Permasalahan dan Isu Strategis	39
Tabel 2.4.1	Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat	41
Tabel 3.1.1	Target Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2025	60
Tabel 3.2.1	Target Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025	63
Tabel 3.3.1	Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	66
Tabel 3.4.1	Identifikasi Risiko Strategis Rencana Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	81
Tabel 3.4.2	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian Atas Risiko Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	84
Tabel 4.1.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja dengan melalui 6 (enam) tahapan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, yaitu :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD. Dokumen Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menampung program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam KUA PPAS serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Renja Bappeda adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan tahunan. Tujuan Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Bappeda untuk melaksanakan rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Pendanaan Indikatif Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
2. Sebagai pedoman Pengendalian dan Evaluasi terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Bappeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja Bappeda, proses penyusunan Renja Bappeda, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan Dokumen RKPD dan Renstra Bappeda dan dengan Renja K/L

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappeda serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bappeda.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Bappeda Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

3.4. Mitigasi Risiko

Menjelaskan risiko-risiko dalam pencapaian sasaran strategis dan operasional

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Berisi uraian berupa penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, serta untuk memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan perencanaan tahun 2025, hasil evaluasi kinerja pada tahun 2023 menjadi salah satu input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Untuk mendukung dan menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2023 Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung dari APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 19.162.519.700,- Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (2 program urusan dan 1 program penunjang), 14 kegiatan dan 56 Sub Kegiatan. Dari jumlah tersebut realisasi anggaran yang telah terserap adalah Rp 18.915.107.604,- atau sebesar 98,71%, dengan kinerja masing-masing program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan merupakan program dengan porsi anggaran paling besar yaitu Rp 17.030.946.642,- dengan realisasi keuangan sebesar 98,76% atau sebesar Rp 16.819.340.904,-. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dengan target pada tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi 100%. Program ini terdiri atas 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan yang digunakan untuk mendukung capaian sasaran kinerja Bappeda yaitu 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target pada tahun 2023 sebesar 79,25 dan terealisasi 81,73 atau sebesar 103,13%, dan 2) Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan target pada tahun 2023 sebesar 86 dan terealisasi 96,93 atau sebesar 112,71%.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) dengan pagu anggaran sebesar Rp 998.186.225,- dan realisasi keuangan sebesar 99,60 % atau sebesar Rp 994.211.050,-. Program ini terdiri atas 3 kegiatan dan 7

sub kegiatan yang digunakan untuk mendukung capaian sasaran kinerja Bappeda yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi, dengan target kinerja program pada tahun 2023 sebesar 87% dan terealisasi sebesar 72,57%. Hal ini berarti bahwa masih ada target sasaran pembangunan yang belum tercapai sampai akhir tahun 2023, dimana sampai akhir tahun 2023 dari 54 indikator kinerja utama hanya 37 indikator yang tercapai sesuai dengan target, sedangkan dari 230 indikator kinerja daerah hanya 189 indikator yang tercapai sesuai dengan target.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pagu anggaran pada TA 2023 sebesar Rp 1.133.386.833,- dengan realisasi keuangan sebesar 97,19% atau sebesar Rp 1.101.555.650,-. Program ini terdiri atas 3 kegiatan dan 23 sub kegiatan yang digunakan untuk mendukung capaian sasaran kinerja Bappeda yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD, dengan target tahun 2023 yaitu 60% dan terealisasi sebesar 82,15%. Hal ini berarti bahwa sub kegiatan pada RKPD Tahun 2023 dinilai efektif dalam mendukung sasaran RPJMD.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.1 berikut :

Tabel 2.1.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01	PERENCANAAN				19.162.519.700		18.915.107.604	100%	98,71
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	17.030.946.642	100	16.819.340.904	100%	98,76%
5.1.1.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	100	75.590.250	100	72.692.000	100%	96,17%
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dokumen	6	32.148.750	6	31.728.250	100,00%	98,69%
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	dokumen	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	dokumen	8	43.441.500	8	40.963.750	100,00%	94,30%
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	dokumen	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.1.1.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	100	11.134.886.770	100	11.072.355.763	100%	99,44%
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	orang	81	10.927.128.520	81	10.866.478.513	100,00%	99,44%
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	22	169.654.250	10	167.774.250	45,45%	98,89%
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	dokumen	-	-	-	-	0,00%	0,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	dokumen	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	dokumen	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	dokumen	13	38.104.000	13	38.103.000	100,00%	100,00%
5.1.1.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	100	112.669.042	100	111.049.380	100%	98,56%
5.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	dokumen	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	unit	11	104.303.792	11	104.270.880	100,00%	99,97%
5.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	dokumen	2	2.040.000	2	2.040.000	100,00%	100,00%
5.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited)	dokumen	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	dokumen	7	6.325.250	7	4.738.500	100,00%	74,91%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.1.1.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	-	100	-	100%	#DIV/0!
5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola. - Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun	dokumen dokumen	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. - Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti kegiatan capacity building.	orang orang	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan diikuti. - Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	kali orang	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	orang	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.1.1.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi Umum	%	100	2.641.657.734	100	2.562.763.946	100%	97,01%
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis	24	23.802.400	24	23.792.200	100,00%	99,96%
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	7	75.183.050	6	42.214.053	85,71%	56,15%
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	jenis	13	154.496.820	13	148.747.379	100,00%	96,28%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	62	143.959.100	62	134.846.900	100,00%	93,67%
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	11	25.000.000	11	25.000.000	100,00%	100,00%
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	jenis	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan	4	1.959.216.364	4	1.928.163.414	100,00%	98,42%
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan	orang	4	260.000.000	4	260.000.000	100,00%	100,00%
5.1.1.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	100	1.093.028.860	100	1.091.447.000	100%	99,86%
5.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	unit	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	unit	1	52.985.914	1	52.947.000	100,00%	99,93%
5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	unit	3	1.040.042.946	3	1.038.500.000	100,00%	99,85%
5.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya yang diadakan	jenis	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.1.1.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.470.823.986	100	1.435.686.047	100%	97,61%
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	-	-	-	-	0,00%	0,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah tagihan lisensi zoom meeting yang dibayarkan. - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan. - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan.	meter kubik bulan kwh rekening	2660 12 182000 8	302.790.000	2625 12 170424 8	284.792.317	100,00%	94,06%
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang	27	1.168.033.986	27	1.150.893.730	100,00%	98,53%
5.1.1.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	502.290.000	100	473.346.768	100%	94,24%
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit	1	41.190.000	1	38.735.578	100,00%	94,04%
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	10	292.210.000	9	288.977.880	90,00%	98,89%
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	59	54.340.000	59	51.642.510	100,00%	95,04%
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	unit	1	74.200.000	1	63.383.800	100,00%	85,42%
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	unit	55	40.350.000	53	30.607.000	96,36%	75,85%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	%	87	998.186.225	72,57	994.211.050	83,41%	99,60%
5.01.02.1.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	dokumen	2	775.011.175	2	772.873.700	100%	99,72%
5.01.02.1.01.02	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah	dokumen	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	dokumen	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	dokumen Berita Acara	1	45.630.500	1	45.608.250	100,00%	99,95%
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	dokumen Berita Acara	1	245.818.200	1	245.608.950	100,00%	99,91%
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	dokumen	2	483.562.475	2	481.656.500	100,00%	99,61%
5.01.02.1.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	dokumen	2	79.103.750	2	79.084.050	100%	99,98%
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen	1	25.368.950	1	25.356.750	100,00%	99,95%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Laporan hasil pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	dokumen	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil pembinaan dan koordinasi pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	dokumen	1	53.734.800	1	53.727.300	100,00%	99,99%
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun.	dokumen	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.01.02.1.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	%	87	144.071.300	78,17	142.253.300	90%	98,74%
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	dokumen	2	57.029.800	2	57.012.800	100,00%	99,97%
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.	dokumen	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	dokumen	41	87.041.500	41	85.240.500	100,00%	97,93%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	%	60	1.133.386.833	82	1.101.555.650	136,92%	97,19%
5.01.03.1.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dokumen	2	474.718.500	2	463.788.150	100%	97,70%
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	dokumen	2	45.471.800	2	42.426.050	100,00%	93,30%
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	rumusan	1	35.954.500	1	34.821.750	100,00%	96,85%
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan	1	40.663.350	1	40.064.550	100,00%	98,53%
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	laporan	1	12.317.500	1	11.498.000	100,00%	93,35%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	dokumen	2	38.150.600	2	37.733.100	100,00%	98,91%
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	rumusan	1	25.449.600	1	24.987.850	100,00%	98,19%
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	laporan	1	64.627.650	1	61.184.400	100,00%	94,67%
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	laporan	1	212.083.500	1	211.072.450	100,00%	99,52%
5.01.03.1.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen	2	392.250.188	2	379.098.150	100%	96,65%
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	dokumen	2	16.624.700	2	15.990.700	100,00%	96,19%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	rumusan	1	18.895.000	1	17.774.000	100,00%	94,07%
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	laporan	1	67.016.800	1	58.458.700	100,00%	87,23%
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	laporan	1	134.402.988	1	133.170.950	100,00%	99,08%
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	dokumen	2	15.211.600	2	15.191.600	100,00%	99,87%
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	rumusan	1	22.075.900	1	22.056.900	100,00%	99,91%
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laporan	1	92.567.900	1	91.123.600	100,00%	98,44%
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	laporan	1	25.455.300	1	25.331.700	100,00%	99,51%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen	2	266.418.145	2	258.669.350	100%	97,09%
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	dokumen	2	51.885.900	2	50.469.350	100,00%	97,27%
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	rumusan	1	22.561.845	1	22.422.950	100,00%	99,38%
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	laporan	1	64.391.000	1	61.837.550	100,00%	96,03%
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	laporan	1	13.034.500	1	12.945.500	100,00%	99,32%
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	dokumen	2	6.765.700	2	6.158.700	100,00%	91,03%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	rumusan	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	laporan	1	22.309.100	1	20.670.200	100,00%	92,65%
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	laporan	1	85.470.100	1	84.165.100	100,00%	98,47%

Sementara itu, evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2023 serta pengaruhnya terhadap capaian target kinerja pada Renstra Tahun 2021-2026 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.2 berikut ini :

Tabel 2.1.2

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 s.d Tahun Berjalan Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01	PERENCANAAN										
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	600	200	100	100	100	100	400,00	66,67
5.1.1.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	600	200	100	100	100	100	400,00	66,67
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dokumen	13	5	6	6	100	2	13	100,00
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	dokumen	2	2	-	-	-	-	2	100,00
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	dokumen	2	2	-	-	-	-	2	100,00
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	dokumen	18	2	-	-	-	4	6	33,33
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	dokumen	2	2	-	-	-	-	2	100,00
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	dokumen	24	8	8	8	100	4	20	83,33
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	dokumen	24	8	-	-	-	4	12	50,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.1.1.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	600	200	100	100	100	100	400,00	66,67
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjagannya	orang	591	171	100	81	81	100	352	59,56
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	132	40	22	10	45	22	72	54,55
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	dokumen	654	218	-	-	-	109	327	50,00
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	dokumen	6	2	-	-	-	1	3	50,00
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	dokumen	18	4	3	-	-	3	7	38,89
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	dokumen	78	26	13	13	100	13	52	66,67
5.1.1.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	600	200	100	100	100	100	400,00	66,67
5.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindehtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	dokumen	24	4	4	-	-	4	8	33,33
5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	unit	66	23	11	11	100	11	45	68,18
5.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SKPD	- Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penerbitan.	dokumen	8	-	2	2	-	2	4	50,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited)	dokumen	24	7	4	-	-	4	11	45,83
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	dokumen	24	5	4	7	175	4	16	66,67
5.1.1.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	600	200	100	100	100	100	400,00	66,67
5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel	860	175	-	-	-	168	343	39,88
5.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	kali	4	4	-	-	-	-	4	100,00
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	orang	60	-	-	-	-	15	15	25,00
		- Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti kegiatan capacity building.	orang	336	80	80		100	84	164	48,81
5.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan diikuti.	kali	24	5	-	-	-	4	9	37,50
		- Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	orang	30					6	6	20,00
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	orang	39	8	8	-	-	6	14	35,90
5.1.1.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi Umum	%	600	200	100	100	100	100	400,00	66,67
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis	145	37	25	24	96	24	85	58,62

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	41	21	2	6	300	5	32	78,05
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	jenis	102	38	7	13	186	17	68	66,67
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	450	157	58	62	107	75	294	65,33
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	60	17	11	11	100	10	38	63,33
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	jenis	37	13	-	-	-	6	19	51,35
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan	25	9	4	4	100	4	17	68,00
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan	orang	24	8	4	4	100 133,33	4	15 4	16,67
5.1.1.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	600	200	100	100	100	100	400,00	66,67
5.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	unit	4	1	-	-	-	-	1	25,00
5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	unit	50	29	3	1	33	6	36	72,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	unit	22	-	2	3	-	4	7	31,82
5.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya yang diadakan	jenis	6	1	-	-	-	1	2	33,33
5.1.1.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	600	200	100	100	100	100	400,00	66,67
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	3.250	1.786	500	-	-	500	2.286	70,34
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan.	meter kubik	4100	1300	2660	2625	100	700	4625	112,80
		- Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan.	mbps	580	180	-	-	-	100	280	48,28
		- Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan.	kwh	1.470.000	490000	182.000	170424	100	245000	905424	61,59
		- Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan.	rekening	48	16	8	8	100	8	24	50,00
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang	165	52	28	27	96	28	107	64,85
5.1.1.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	600	200	100	100	100	100	400,00	66,67
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit	6	2	1	1	100	1	4	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	60	20	10	9	90	10	39	65,00
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	415	105	75	59	79	70	234	56,39
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	unit	6	2	1	1	100	1	4	66,67
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	unit	288	110	74	53	72	48	211	73,26
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	%	529	158,84	87	72,57	83,41	90	321,41	60,76
5.01.02.1.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	dokumen	18	5	3	2	67	3	10,00	55,56
5.01.02.1.01.02	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah	dokumen	6	1	-	-	-	1	2	33,33

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	dokumen	9	4	-	-	-	2	6	66,67
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	dokumen Berita Acara	6	2	1	1	100	1	4	66,67
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	dokumen Berita Acara	6	2	1	1	100	1	4	66,67
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	dokumen	12	5	3	2	67	2	9	75,00
5.01.02.1.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	dokumen	24	7	4	2	50,00	4	13,00	54,17
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen	6	2	1	1	100	1	4	66,67
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Laporan hasil pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	dokumen	6	2	-	-	-	1	3	50,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil pembinaan dan koordinasi pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	dokumen	6	2	1	1	100	1	4	66,67
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun.	dokumen	6	1	-	-		1	2	33,33
5.01.02.1.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	%	524	160	87	72,57	83,41	87	319,57	60,99
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	dokumen	13	5	2	2	100	2	9	69,23
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.	dokumen	18	6	-	-	-	3	9	50,00
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	dokumen	262	112	42	41	98	38	191	72,90

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	%	390	150	60	82,15	137	70	302,15	77,47
5.01.03.1.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dokumen	14	5	2	2	100	2	9	64,29
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	dokumen	14	5	3	2	67	2	9	64,29
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	rumusan	20	8	3	1	33	3	12	60,00
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan	6	2	1	1	100	1	4	66,67
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	laporan	6	2	1	1	100	1	4	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	dokumen	14	5	3	2	67	2	9	64,29
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	rumusan	20	8	3	1	33	3	12	60,00
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	laporan	6	2	1	1	100	1	4	66,67
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	laporan	6	2	1	1	100	1	4	66,67
5.01.03.1.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen	14	3	2	2	100	2	7	50,00
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	dokumen	14	5	3	2	67	2	9	64,29

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	rumusan	20	8	3	1	33	3	12	60,00
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	laporan	6	2	1	1	100	1	4	66,67
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	laporan	6	2	1	1	100	1	4	66,67
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	dokumen	14	5	3	2	67	2	9	64,29
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	rumusan	20	8	3	1	33	3	12	60,00
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laporan	6	2	1	1	100	1	4	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	laporan	6	2	1	1	100	1	4	66,67
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen	14	5	2	2	100	2	9	64,29
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	dokumen	14	5	3	2	67	2	9	64,29
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	rumusan	20	8	3	1	33	3	12	60,00
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	laporan	6	2	1	1	100	1	4	66,67
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	laporan	6	2	1	1	100	1	4	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	dokumen	14	5	3	2	67	2	9	64,29
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	rumusan	20	8	-	-	-	3	11	55,00
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	laporan	6	2	1	1	100	1	4	66,67
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	laporan	6	2	1	1	100	1	4	66,67

Dari data sebagaimana tabel 2.1.2 tersebut di atas dapat dilihat :

1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

- a. Dalam rangka pencapaian target kinerja Bappeda Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan 3 program (1 program penunjang urusan dan 2 program urusan) dengan 3 indikator program, 14 kegiatan dengan 14 indikator kegiatan, dan 56 sub kegiatan dengan 56 indikator keluaran.
- b. Dari 3 program dengan 3 indikator kinerja program, masih terdapat 1 program yang targetnya belum tercapai yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan target kinerja program yaitu Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi dengan target sebesar 87% dan terealisasi sebesar 72,57% atau sebesar 83,41%.

Indikator kinerja program yang belum tercapai pada tahun 2023 ini disebabkan oleh beberapa faktor hambatan :

- 1) Target IKU dan IKD pada beberapa perangkat daerah banyak yang tidak tercapai disebabkan tidak tepatnya penempatan belanja pada sub kegiatan pendukung.
 - 2) Belum konsistennya melakukan evaluasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu melaksanakan evaluasi capaian rencana kinerja perangkat daerah per triwulan dikarenakan beban kerja yang cukup tinggi.
 - 3) Minimnya informasi dari Perangkat Daerah terutama dalam penyusunan faktor pendorong dan penghambat sebagai bahan analisis data capaian kinerja pembangunan daerah.
- c. Sementara itu, program yang sudah tercapai target indikatornya terdapat pada 2 program, yaitu :
- 1) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target kinerja program yaitu Persentase efektivitas kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD dengan target sebesar 60% dan terealisasi sebesar 82,15% atau sebesar 137%. Faktor-faktor penyebab pencapaian kinerja program memenuhi/melampaui target kinerja dikarenakan efektifnya koordinasi dan komunikasi antara Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Perangkat Daerah mitra dalam penyusunan dokumen serta dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi.
 - 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target kinerja program yaitu Persentase ketercapaian urusan pemerintahan daerah dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Faktor-faktor penyebab pencapaian kinerja program pada tahun 2023 diantaranya :
 - Komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja.
 - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

d. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Dari 14 kegiatan dengan 14 indikator yang direncanakan, terdapat 1 kegiatan dengan 1 indikator yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan 13 kegiatan yang indikatornya memenuhi target yang direncanakan dengan capaian sebesar 100%. 1 (satu) kegiatan yang tidak memenuhi target yang direncanakan tersebut yaitu Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian sebesar 84,41% dari target 87% dan realisasi 72,57%. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut adalah :

- 1) Pelaksanaan kegiatan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah belum maksimal dan belum dilakukan secara berkala.
- 2) Analisis faktor pendorong dan faktor penghambat dari ketercapaian pelaksanaan kinerja perangkat daerah belum maksimal dilakukan.
- 3) Tindak lanjut evaluasi terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah belum dilaksanakan.

e. Realisasi Capaian Kinerja Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun 2023, dari 56 sub kegiatan terdapat 1 sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah tidak terlaksananya pembelian 4 unit infokus karena ketidaksesuaian harga di pasaran dengan harga pada DPA, dalam hal ini harga pada DPA terlalu rendah untuk spesifikasi produk yang sama. Setelah dilakukan konsultasi dengan Inspektorat dan BPKAD, diambil keputusan untuk tidak membeli infokus dimaksud.

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra.

Kinerja Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diukur melalui sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan, pada tahun 2023 tercapai sebesar 79,97% dari target 77% atau dengan angka capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 106,57%. Nilai ini menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan perencanaan telah berusaha maksimal dalam meningkatkan kualitas perencanaan di Sumatera Barat.

3. Kebijakan dan strategi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang akan dilakukan pada Tahun 2025 untuk mengatasi faktor penghambat tidak tercapainya sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 antara lain :

- a. Melakukan dialog publik untuk menyampaikan isu-isu permasalahan pembangunan dan penyusunan kebijakan dengan memaksimalkan pemanfaatan media sosial Bappeda.
- b. Melakukan dialog kinerja dengan Legislatif untuk menyamakan arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

- c. Meningkatkan peran koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota agar perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan bisa dijalankan dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
- d. Mengoptimalkan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui optimalisasi evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah serta kualitas hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah.
- e. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pada tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, baik pada level rincian output hingga lokasi/lokus untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan target RPJMD sehingga target IKU dan IKD dapat tercapai.
- f. Melaksanakan pengendalian dan monitoring untuk memastikan Perangkat Daerah menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil evaluasi.
- g. Meminta kehadiran SDM pelaksana kegiatan dalam setiap rapat evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah.
- h. Mengembangkan inovasi perencanaan yang sudah dibangun (Sakatoplan, dashboard pembangunan, SIGAMAD, Sumbapreneur).
- i. Menyusun perencanaan yang matang dengan melakukan analisis terhadap kebutuhan belanja pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan agar tepat dalam mendukung ketercapaian target kinerja program.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja suatu organisasi. Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh penyusunan dokumen perencanaan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai dokumen perencanaan resmi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah. Dokumen Perencanaan tersebut antara lain :

1. Penyusunan Dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Penyusunan Dokumen Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RKPD Perubahan;
4. Database Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kebijakan Satu Data Indonesia;
5. Pengendalian dan Evaluasi rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) dan dokumen Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Renstra dan Renja);
6. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas dokumen perencanaan Kabupaten/kota (RPJPD, RPJMD dan RKPD) se Sumatera Barat;

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance, serta didukung oleh kinerja aparatur perencanaan yang kompeten.

Selanjutnya, kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Berikut pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.2.1 berikut :

Tabel 2.2.1
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Bappeda Prov. Sumatera Barat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kualitas Perencanaan	%	77	81	85	89	79,97	-	85	89	
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kinerja OPD	%	79,25	80,25	81,25	82,25	81,73	-	82,25	82,83	
3.	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	%	86,00	87,00	89,00	91,00	96,93	-	97,15	97,25	
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2023							106,57				

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian target kinerja Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan dapat dinyatakan “berhasil”, karena realisasi 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategisnya mencapai 100% keatas. Secara rata-rata capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 106,57% dengan realisasi anggaran sebesar 98,71%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, serta

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tentu ada tantangan dan peluang untuk lima tahun kedepan, berdasarkan hal tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda. Setelah dilakukan identifikasi resiko terhadap beberapa akar masalah dalam pencapaian kinerja pelayanan Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan penunjang perencanaan, maka dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.1 berikut :

Tabel 2.3.1
Pemetaan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah
Pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal	Proses tahapan perencanaan belum optimal	Pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang belum optimal
		Pengendalian terhadap pelaksanaan Forum Perangkat Daerah belum optimal
	Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah	Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal
		Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum optimal didasarkan pada skala prioritas pembangunan
		Perumusan tolok ukur kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan
		Perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan analisa kebutuhan
	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan belum optimal
		Ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal
		Dukungan Perangkat Daerah terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi adalah :

1. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan masih rendah menyebabkan persentase rencana kerja pembangunan yang seharusnya mengakomodir masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan berkurang sehingga kualitas perencanaan pembangunan daerah tidak maksimal dan kurang tepat sasaran.
2. Menciptakan inovasi pelaksanaan Musrenbang yang efektif yang dapat menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dari proses Bottom Up, agar memperoleh akses yang cukup memadai dalam kebijakan penganggaran pembangunan.
3. Konsistensi perencanaan selama proses perencanaan dan penganggaran berlangsung pada seluruh Perangkat Daerah memerlukan pendampingan, pengawalan, monitoring dan koordinasi intensif.
4. Penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi memerlukan kesamaan pemahaman oleh semua Perangkat Daerah secara berjenjang.
5. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bappeda Provinsi Sumatera Barat agar memiliki kapasitas untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.
6. Dukungan Perangkat Daerah terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal.

Sementara itu, terdapat peluang bagi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tupoksinya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, antara lain :

1. Kepedulian dan partisipasi masyarakat baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Dukungan SDM Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan kompetensi dan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi semakin meningkatkan peran Bappeda sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
3. Dukungan sistim informasi berikut pengembangannya dalam penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi.
4. Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tabel 2.3.2 berikut :

Tabel 2.3.2
Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
<p>Proses Tahapan Perencanaan Belum Optimal</p> <p>a. Pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang belum optimal.</p> <p>b. Pengendalian terhadap pelaksanaan Forum Perangkat Daerah belum optimal.</p>	<p>Optimalisasi perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas</p>
<p>Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah.</p> <p>a. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal.</p> <p>b. Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum optimal didasarkan pada skala prioritas pembangunan.</p> <p>c. Perumusan tolok ukur kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan.</p> <p>d. Perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan analisa kebutuhan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal. 2. Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 3. Peningkatan peran BAPPEDA Sumatera Barat sebagai katalisator pembangunan daerah 4. Regulasi terhadap tahapan dan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta sistim informasi pembangunan daerah yang belum optimal dari pusat.
<p>Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal.</p> <p>a. Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan belum optimal.</p> <p>b. Ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal.</p> <p>c. Dukungan Perangkat Daerah terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal.</p> <p>d. Pengendalian pembangunan belum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Hasil Monitoring dan Evaluasi untuk Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 2. Dokumen perencanaan dan penganggaran berdasarkan Tematik, Holistik, Integritas, Spasial 3. Optimalisasi hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah

Permasalahan	Isu Strategis
diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah.	

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review dan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program, kegiatan dan sub kegiatan antara Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan Renja Bappeda Tahun 2025, termasuk indikator kinerja, target capaian dan pagu indikatif.

Hasil analisa kebutuhan pagu anggaran tahun 2025 Bappeda Provinsi Sumatera Barat terhadap pagu Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4.1 berikut.

Tabel 2.4.1
T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat

Kode	Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)				
5							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	01					27.738.743.000	PERENCANAAN					27.738.743.000				
5	01	01				17.918.647.303	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	17.918.647.303	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	17.918.647.303
5	01	01	1.01			106.436.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	106.436.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	106.436.500
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	6 dokumen	56.606.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	6 dokumen	56.606.000
5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	-	-
5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	-	-
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	-	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	-	-

Kode	Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	-	-	
5 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 laporan	14.147.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 laporan	14.147.000	
5 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 laporan	35.683.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 laporan	35.683.500	
5 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	11.916.378.635	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	11.916.378.635	
5 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	11.640.495.535	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	11.640.495.535	
5 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	236.511.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	236.511.800	
5 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	109 dokumen	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	109 dokumen	-	

Kode	Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	-	
5 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	-	
5 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	39.371.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	39.371.300	
5 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	140.474.900	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	140.474.900	
5 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindehtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta	4 dokumen	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindehtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta	4 dokumen	-	
5 01 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah BMD yang diasuransikan. - Jumlah Close-Sircuit Television (CCTV) yang dipasang	1 dokumen	119.400.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah BMD yang diasuransikan. - Jumlah Close-Sircuit Television (CCTV) yang dipasang	1 dokumen	119.400.000	
5 01 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban. - Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya.	2 laporan	11.300.000	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban. - Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya.	2 laporan	11.300.000	

Kode	Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	4 dokumen	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	4 dokumen	-	
5 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	4 laporan	9.774.900	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	4 laporan	9.774.900	
5 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	447.218.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	447.218.000	
5 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	168 paket	135.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	168 paket	135.000.000	
5 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	0	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	0	-	
5 01 01 1.05 05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. - Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building.	84 orang	312.218.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. - Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building.	84 orang	312.218.000	
5 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan - Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	0	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan - Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	0	-	

Kode	Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	0	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	0	-	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan umum perangkat daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.877.356.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan umum perangkat daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.877.356.600	
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 paket	33.892.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 paket	33.892.500	
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0	-	
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17 paket	157.400.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17 paket	157.400.000	
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	75 paket	114.440.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	75 paket	114.440.100	
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	0	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	0	-	

Kode	Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	0	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	0	-	
5 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah tamu yang dilayani	0	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah tamu yang dilayani	0	-	
5 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 laporan	2.376.624.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 laporan	2.376.624.000	
5 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	1 dokumen	195.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	1 dokumen	195.000.000	
5 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya ketersediaan Barang Milik Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	32.076.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya ketersediaan Barang Milik Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	32.076.000	
5 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	-	-	
5 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Mebel yang diadakan	4 paket	32.076.000	Pengadaan Mebel		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Mebel yang diadakan	4 paket	32.076.000	

Kode	Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	0	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	0	-	
5 01 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	0	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	0	-	
5 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.715.153.168	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.715.153.168	
5 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	500 Surat	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	500 Surat	-	
5 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	4 laporan	348.090.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	4 laporan	348.090.000	
5 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	1 laporan	1.367.063.168	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	1 laporan	1.367.063.168	

Kode	Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)					
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi pemeliharaan barang milik daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	683.553.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi pemeliharaan barang milik daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	683.553.500	
5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	-	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	11 unit	362.490.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	11 unit	362.490.000	
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70 Unit	61.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70 Unit	61.900.000	
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	199.313.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	199.313.500	
5	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihora/direhab	48 Unit	59.850.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihora/direhab	48 Unit	59.850.000	

Kode	Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah		Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	92 persen	4.061.874.382	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah		Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	92 persen	4.061.874.382	
5 01 02 1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Optimalisasi Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	2.452.014.382	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Optimalisasi Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	2.452.014.382	
5 01 02 1.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 dokumen	138.255.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 dokumen	138.255.000	
5 01 02 1.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	1 dokumen	-	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	1 dokumen	-	
5 01 02 1.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	283.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	283.000.000	

Kode	Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 02 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	1 dokumen	-	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	1 dokumen	-	
5 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	630.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	630.000.000	
5 01 02 1.01 06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	2 dokumen	1.400.759.382	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	2 dokumen	1.400.759.382	
5 01 02 02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	383.250.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	383.250.000	
5 01 02 1.02 01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	204.750.000	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	204.750.000	
5 01 02 1.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan hasil pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 dokumen	-	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan hasil pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 dokumen	-	

Kode	Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 02 1.02 03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Sumatera Barat	Laporan hasil pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	1 dokumen	178.500.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Sumatera Barat	Laporan hasil pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	1 dokumen	178.500.000	
5 01 02 1.02 04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	1 dokumen	-	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	1 dokumen	-	
5 01 02 1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	92 persen	1.226.610.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	92 persen	1.226.610.000	
5 01 02 1.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	283.500.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	283.500.000	
5 01 02 1.03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	1 Laporan	-	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	1 Laporan	-	
5 01 02 1.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	187.110.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	187.110.000	
5 01 02 1.03 04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	38 dokumen	756.000.000	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	38 dokumen	756.000.000	

Kode	Rancangan awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah		Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKP yang mendukung sasaran RPJMD	75 persen	5.758.221.315	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah		Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKP yang mendukung sasaran RPJMD	75 persen	5.758.221.315	
5 01 03 1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKP) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 dokumen	1.131.261.350	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKP) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 dokumen	1.131.261.350	
5 01 03 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3 dokumen	328.888.800	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3 dokumen	328.888.800	
5 01 03 1.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	3 laporan	43.941.700	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	3 laporan	43.941.700	

Kode	Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	106.860.750	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	106.860.750	
5 01 03 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	3 laporan	60.130.800	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	3 laporan	60.130.800	
5 01 03 1.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 dokumen	165.803.500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 dokumen	165.803.500	
5 01 03 1.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	3 laporan	74.132.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	3 laporan	74.132.000	
5 01 03 1.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	129.810.900	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	129.810.900	
5 01 03 1.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	3 laporan	221.692.900	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	3 laporan	221.692.900	

Kode	Rancangan awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)					
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 dokumen	1.582.574.410	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 dokumen	1.582.574.410	
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 dokumen	500.722.200	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 dokumen	500.722.200	
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	3 laporan	45.586.100	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	3 laporan	45.586.100	
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	143.705.900	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	143.705.900	
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	3 laporan	136.560.600	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	3 laporan	136.560.600	
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3 dokumen	455.202.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3 dokumen	455.202.000	

Kode	Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 03 1.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	3 laporan	43.067.509	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	3 laporan	43.067.509	
5 01 03 1.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 laporan	182.080.800	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 laporan	182.080.800	
5 01 03 1.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	3 laporan	75.649.301	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	3 laporan	75.649.301	
5 01 03 1.03	5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 dokumen	3.044.385.555	5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 dokumen	3.044.385.555	
5 01 03 1.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Sumatera Barat	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3 dokumen	728.323.200	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Sumatera Barat	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3 dokumen	728.323.200	
5 01 03 1.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	3 laporan	364.161.600	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	3 laporan	364.161.600	

Kode	Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 03 1.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	318.641.400	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	318.641.400	
5 01 03 1.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	3 laporan	82.764.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	3 laporan	82.764.000	
5 01 03 1.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Sumatera Barat	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3 dokumen	728.323.200	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Sumatera Barat	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3 dokumen	728.323.200	
5 01 03 1.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	3 laporan	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	3 laporan	-	
5 01 03 1.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan	227.601.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan	227.601.000	
5 01 03 1.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan	594.571.155	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan	594.571.155	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi.

Bappeda Provinsi Sumatera Barat tidak secara langsung menampung atau mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Bappeda Provinsi Sumatera Barat maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan hasil musrenbang kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 tidak ada masukan usulan program dan kegiatan/sub kegiatan masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Penyusunan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, sasaran RPJMN, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Penyusunan RKP juga mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, sekaligus menjadi window opportunity untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Karena itu, RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam

RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan Non-State Actor untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan” dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

1. SDM Berkualitas, dengan sasaran SDM berdaya saing dan produktif
Transformasi Sosial :
 - Penetapan wajib belajar 13 tahun
 - Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan
 - Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting
 - Penetapan penggunaan regsosek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif
 - Penetapan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
 - Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-systemKetahanan Sosial Budaya dan Ekologi :
 - Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa







2. Infrastruktur Berkualitas, dengan sasaran infrastruktur untuk peningkatan produktifitas
Transformasi Ekonomi :
 - Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
 - Penguatan infrastruktur digital
 - Pengembangan infrastruktur transisi energi
 - Percepatan infrastruktur IKNKetahanan Sosial Budaya dan Ekologi :
 - Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan.
Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan :
 - Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
 - Pengembangan skema graduasi bansos
 - Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya.
 - Peningkatan ketrampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
 - Peningkatan partisipasi sosial, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja.
 - Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan

- Peningkatan produksi industri olahan
- Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
- Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi

Berdasarkan tema RKP Tahun 2025 dan arah kebijakan sebagaimana disebutkan diatas, maka ditetapkan sasaran pembangunan untuk tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Indikator Makro Pembangunan	Target RKP 2025	Target Provinsi Tahun 2025 (Dalam RPJMD)	Target RKPD 2025
 Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.3 - 5.6	4,7	4,7
 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 - 5.0	5,94	5,94
 Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	5,9	5,9
 Rasio Gini (nilai)	0.379 - 0.382	0,289	0,289
 Indeks Modal Manusia (nilai)	0,56	-	0,57
 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	38,6	-	52,62

Sumber Data : RKPD Prov. Sumatera Barat Tahun 2025

Sementara itu, dalam Rancangan Akhir RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat tema yang dibagi berdasarkan wilayah. Untuk wilayah Pulau Sumatera tema pembangunannya adalah Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan dan tema pembangunan untuk Provinsi Sumatera Barat adalah Mandala Pengembangan Agrikultur bernilai tinggi, ekonomi hijau dengan highlight arah kebijakan sebagai berikut :

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan/Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pembangunan kawasan afirmasi Kep. Mentawai • Penguatan pendidikan tinggi STEAM, khususnya untuk

	<p>mendukung pengembangan agrikultur, ekonomi hijau, dan kepariwisataan (pilot project: Universitas Andalas).</p>
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agroindustri terpadu di Padang; • Pengembangan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Minangkabau-Mentawai; • Lanjutan pembangunan tol Trans Sumatra ruas Pekanbaru-Padang; • Pengembangan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Padang; • Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas ruas Siak-Pekanbaru-Padang; • Pembangunan pembangkit listrik terbarukan berbasis hidro (PLTA Masang) dan panas bumi (PLTP Muara Laboh) serta interkoneksi Sistem Transmisi Sumatera
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan tata kelola dan kelembagaan perkotaan di Metropolitan Padang
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah (termasuk di tingkat nagari); • Pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan di kawasan afirmasi Kep. Mentawai, atau government-induced activities lainnya, guna meningkatkan basis permintaan
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan strategis agrikultur Sumatra Barat; • Akselerasi pemanfaatan sumber daya EBT sebagai sumber pembangkitan tenaga Listrik (potensi hydropower Sumatra Barat: 1.000 MW); • Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis dan peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat

3.2.1 Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 secara umum ditujukan untuk :

1. Menjadi acuan bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025.
2. Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan dengan implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.
3. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menilai implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan operasional Tahun 2025.

Secara khusus berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat di bidang perencanaan pembangunan yang sudah dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, maka tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah:

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, dengan indikator kinerja tujuan Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi.
2. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan 2 indikator tujuan 1) Nilai akuntabilitas kinerja; 2) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

3.2.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka dapat digambarkan target tujuan dan

sasaran Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.2.1 berikut:

Tabel 3.2.1
Target Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target RPJMD dan Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target pada Renja 2025
Tujuan 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi	26,62	26,13	26,62
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	85	79,97	85
Tujuan 2 : Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	81,25 89	81,73 96,93	84,25 97,25
Sasaran 2 : 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	81,25 89	81,73 96,93	84,25 97,25

Sumber : Renstra Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026

3.3. Program dan Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 didasarkan kepada upaya pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sekaligus mendukung pencapaian misi ke-7 Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

Selanjutnya, Program dan Kegiatan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Program tersebut terdiri atas 2 (dua) program perencanaan dan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan, dengan potret rencana program pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi, dengan target 92%.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD, dengan target 75%.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dengan target 100%.

Rencana program tersebut didukung oleh 14 kegiatan dan 66 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 27.738.743.000,- sebagaimana terlihat pada tabel 3.3.1 berikut ini :

Tabel 3.3.1

**T-C.33. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026**

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
5	UNSUB	UNSUB												
5	01	PERENCANAAN					27.738.743.000					29.067.461.999		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 persen	17.918.647.303				100 persen	15.696.693.999	
5	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		100%	106.436.500				100%	226.710.745
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	6 dokumen	56.606.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar	6 dokumen	162.312.460
5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-	-
5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-	-
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-	-
5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-	-

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandangan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 laporan	14.147.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 dokumen	23.432.798
5 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 laporan	35.683.500	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 dokumen	40.965.488
5 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100%	11.916.378.635				100%	9.785.108.434
5 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 orang/bulan	11.640.495.535	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		100 orang	9.202.358.434
5 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	12 dokumen	236.511.800	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		22 orang	509.250.000
5 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	109 dokumen	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		109 dokumen	-
5 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		1 laporan	-
5 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		3 laporan	-
5 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	13 laporan	39.371.300	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		13 laporan	73.500.000

Kodeifikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandangan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100%	140.474.900				100%	316.674.215
5 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 dokumen	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 dokumen	-
5 01 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		- Jumlah BMD yang diasuransikan. - Jumlah Close-Sircuit Television (CCTV) yang dipasang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	119.400.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		11 unit	135.549.215
5 01 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD		- Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban. - Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorarnya.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 laporan	11.300.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		2 dokumen 4 orang	131.250.000
5 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 dokumen	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 dokumen	-
5 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 laporan	9.774.900	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 dokumen	49.875.000
5 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	447.218.000	APBD			100%	580.650.000
5 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	168 paket	135.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		168 stel	144.900.000
5 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 dokumen	-

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandangan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 01 1.05 05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. - Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	84 orang	312.218.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		15 orang 84 orang	309.750.000
5 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan - Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 kali 6 orang	63.000.000
5 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		- Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		6 orang	63.000.000
5 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan umum perangkat daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	2.877.356.600				100%	1.812.441.220
5 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	24 paket	33.892.500	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		24 jenis	21.000.000
5 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		8 jenis	259.248.914
5 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	17 paket	157.400.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		17 jenis	57.893.850
5 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	75 paket	114.440.100	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		75 jenis	421.377.079
5 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		10 jenis	26.250.000
5 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		6 jenis	-

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang dilayani	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		130 orang	-
5 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 laporan	2.376.624.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 laporan	740.021.377
5 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	195.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 orang	286.650.000
5 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya ketersediaan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	32.076.000				100%	669.538.266
5 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		1 unit	-
5 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 paket	32.076.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 unit	157.500.000
5 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		6 unit	512.038.266
5 01 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		1 jenis	-
5 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.715.153.168				100%	1.737.668.869
5 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	500 Surat	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		500 Surat	-
5 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 laporan	348.090.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		700 meter kubik 100 mbps 245000 KVA 8 rekening	437.724.000

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	1.367.063.168	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		28 orang	1.299.944.869
5 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		100%	683.553.500				100%	567.902.250
5 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 unit	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		1 unit	-
5 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	11 unit	362.490.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		10 unit	244.009.500
5 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah PeralatandanMesinLainnya yang Dipelihara	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	70 Unit	61.900.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		70 Unit	82.131.000
5 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 unit	199.313.500	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		1 unit	210.261.750
5 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	48 Unit	59.850.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		48 Unit	31.500.000

Kodeifikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi		92 persen	4.061.874.382				95 persen	5.121.738.000
5 01 02 1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Optimalisasi Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan		3 dokumen	2.452.014.382				3 dokumen	2.962.218.000
5 01 02 1.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	138.255.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	146.218.000
5 01 02 1.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	330.000.000
5 01 02 1.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen Berita Acara	283.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen Berita Acara	286.000.000
5 01 02 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	-

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen Berita Acara	630.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen Berita Acara	660.000.000
5 01 02 1.01 06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	1.400.759.382	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	1.540.000.000
5 01 02 02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah		4 dokumen	383.250.000				4 dokumen	874.500.000
5 01 02 1.02 01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	204.750.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	214.500.000
5 01 02 1.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah Laporan hasil pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	198.000.000
5 01 02 1.02 03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Laporan hasil pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Barat	1 dokumen	178.500.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	187.000.000
5 01 02 1.02 04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	275.000.000

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
5	01	02	1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan		92 persen	1.226.610.000			95 persen	1.285.020.000	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	283.500.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	2 dokumen	297.000.000
5	01	02	1.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	1 Laporan	-
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	187.110.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	3 dokumen	196.020.000
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	38 dokumen	756.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	38 dokumen	792.000.000

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD		75 persen	5.758.221.315				80 persen	8.249.030.000
5 01 03 1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		3 dokumen	1.131.261.350				2 dokumen	2.859.985.295
5 01 03 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	328.888.800	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	344.429.280
5 01 03 1.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	43.941.700	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	238.355.500

Kodeifikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	106.860.750	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	111.910.000
5 01 03 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	60.130.800	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	143.013.300
5 01 03 1.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	165.803.500	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	593.757.800
5 01 03 1.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	74.132.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	664.296.725
5 01 03 1.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sumatera Barat	1 Laporan	129.810.900	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	269.463.490
5 01 03 1.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	221.692.900	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	494.759.200

Kodeifikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
5	01 03 1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		3 dokumen	1.582.574.410				2 dokumen	2.195.692.693
5	01 03 1.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	500.722.200	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	524.382.000
5	01 03 1.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	45.586.100	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	281.259.460
5	01 03 1.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sumatera Barat	1 Laporan	143.705.900	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	150.602.730
5	01 03 1.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	136.560.600	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	143.013.300
5	01 03 1.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	455.202.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	476.710.960

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 03 1.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	43.067.509	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	286.026.570
5 01 03 1.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Barat	1 laporan	182.080.800	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	190.684.385
5 01 03 1.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	75.649.301	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	143.013.288
5 01 03 1.03	5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		3 dokumen	3.044.385.555				2 dokumen	3.193.352.012
5 01 03 1.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Barat	3 dokumen	728.323.200	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	762.737.540
5 01 03 1.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	364.161.600	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	381.368.760

Kodeifikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 03 1.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	318.641.400	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	333.697.600
5 01 03 1.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	82.764.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	86.674.720
5 01 03 1.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Barat	3 dokumen	728.323.200	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	762.737.530
5 01 03 1.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	-
5 01 03 1.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Sumatera Barat	1 Laporan	227.601.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	238.355.480
5 01 03 1.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	594.571.155	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	627.780.382

3.4. Mitigasi Risiko

Dalam pencapaian tujuan “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”, berkemungkinan ditemui risiko-risiko yang akan menghambat tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), risiko didefinisikan lebih spesifik pada hal-hal yang hanya mengancam pencapaian tujuan yaitu sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, risiko pemerintah daerah secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Termasuk dalam risiko pemerintah daerah adalah risiko Perangkat Daerah, yang merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta risiko pada tingkatan kegiatan. Agar risiko-risiko tersebut bisa dikendalikan, maka Perangkat Daerah melakukan Pengelolaan Risiko Strategis. Pengelolaan Risiko Strategis ini bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Pengelolaan atas risiko juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP. Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya maka akan baik pula penyelenggaraan SPIPnya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola pemerintah juga akan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat melakukan identifikasi risiko terhadap pencapaian sasaran tujuan berdasarkan identifikasi terhadap faktor penghambat yang telah dijelaskan sebelumnya dengan hasil identifikasi sebagaimana pada tabel 3.4.1 dan tabel 3.4.2 berikut :

Tabel 3.4.1
Identifikasi Risiko Strategis Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas								
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Proses tahapan perencanaan pembangunan tidak optimal dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku.	Kepala Bappeda	Ketepatan waktu pelaksanaan proses tahapan perencanaan (Forum Perangkat daerah, Konsultasi Publik dan Musrenbang Provinsi) belum optimal dilaksanakan.	Kepala Bidang	C	Menghambat Efektivitas rangkaian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah dijadwalkan dalam kalender perencanaan.	Pemprov. Sumbar
					Tingkat keterlibatan pemangku kepentingan (Stakeholder)	Kepala Bidang	C	Usulan Rencana Kerja yang mengakomodasi berbagai kepentingan sesuai dengan kebutuhan	Pemprov. Sumbar dan masyarakat

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan masih kurang			yang diprioritaskan jadi tidak variatif dan tidak mencerminkan kebutuhan daerah secara utuh.	
					Usulan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan yang diakomodir dalam proses tahapan perencanaan masih kurang.	Kepala Bidang	C	Usulan Rencana Kerja yang mengakomodasi berbagai kepentingan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan jadi tidak variatif dan tidak mencerminkan kebutuhan daerah secara utuh.	Pemprov. Sumbar dan masyarakat
			Kualitas dokumen perencanaan pembangunan masih kurang.	Kepala Bappeda	Data dan informasi pembangunan yang akurat dan mutakhir untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi belum optimal terpenuhi.	Kepala Bidang	C	Menyulitkan bagi seorang perencana dan evaluator dalam menyusun suatu rencana dan langkah-langkah evaluasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk pembangunan daerah	Pemprov. Sumbar

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
								serta mengatasi permasalahan pembangunan daerah, sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan tidak akan menjawab kebutuhan pembangunan daerah.	
					Konsistensi dalam dokumen perencanaan belum terjaga dengan baik.	Kepala Bidang	C	Tujuan pembangunan daerah akan sulit tercapai.	Pemprov. Sumbar dan Masyarakat
			Tindak lanjut terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak optimal dilakukan.	Kepala Bappeda	Evaluasi dan fasilitasi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan belum optimal dilakukan.	Kepala Bidang	C	Keberhasilan pembangunan daerah sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan akan sulit dicapai	Pemprov. Sumbar dan Masyarakat

Tabel 3.4.2
Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Risiko Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

No	Risiko	Pengendalian yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penganggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Proses tahapan perencanaan pembangunan tidak optimal dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku	Proses tahapan penyusunan perencanaan sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 telah diikuti (Konsultasi Publik dan Musrenbang)	Meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan proses tahapan perencanaan dengan menyusun kalender perencanaan, mensosialisasikan dan mengevaluasi pelaksanaannya.	Kepala Bappeda dan Kabid	Triwulan I dan Triwulan IV
			Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan perencanaan yang ada di Perangkat Daerah terutama Forum Perangkat daerah	Kepala Bappeda dan Kabid	Triwulan I dan Triwulan IV
			Meningkatkan partisipasi stakeholder dalam proses tahapan perencanaan	Kepala Bidang	Triwulan I dan Triwulan IV
2	Kualitas dokumen perencanaan pembangunan masih kurang	Dokumen perencanaan telah memuat IKU dan IKD	Meningkatkan ketersediaan data dukung perencanaan	Kepala Bidang	Triwulan I, II, III dan IV
		Telah dirumuskan Definisi Operasional terhadap IKU, IKD dan Program	Mengembangkan inovasi dalam penyusunan dokumen perencanaan		Triwulan I, II, III dan IV

No	Risiko	Pengendalian yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penganggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Koordinasi dan Verifikasi terhadap dokumen perencanaan telah dilakukan	Meningkatkan koordinasi dan verifikasi terhadap dokumen rencana kerja Perangkat Daerah		Triwulan I, II, III dan IV
3	Tindak lanjut terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak optimal dilakukan	Telah dilaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah	Kepala Bidang	Triwulan I dan Triwulan IV
			Optimalisasi terhadap evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kepala Bidang	Triwulan I, II, III dan IV

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat diperlukan suatu instrumen berupa rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Arah kebijakan serta fokus prioritas rencana kerja sesuai dengan RKPD Tahun 2025 dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
2. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya.
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan/sub kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat terutama untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.
Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Sasaran dari program ini adalah meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi

- 3) Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD

Berdasarkan program tersebut di atas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 sebagaimana telah digambarkan sebelumnya pada Bab III adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
PENUNJANG URUSAN		
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	8	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD
	9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
	15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	18	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	20	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	21	Pengadaan Mebel
	22	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PERENCANAAN		
B	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	
IX	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
	30	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
	31	Pelaksanaan Konsultasi Publik
	32	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
	33	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
X	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	34	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	35	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
	36	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	37	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
XI	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	38	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
		Daerah di Provinsi
	39	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	40	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
C.	Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
XII	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	41	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	42	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	43	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	44	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
	45	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	46	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	47	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	48	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
XIII	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
	49	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	50	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	51	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	52	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
	53	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	54	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	55	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	56	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
XIV	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	57	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
	58	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	59	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	60	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
	61	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	62	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	63	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodifikasi dan Nomenklatur Daerah, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Program/kegiatan/sub kegiatan sesuai peraturan dimaksud dengan 3 Program, 14 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan.

4.2 Pendanaan

Sumber pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 adalah APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 dengan total pagu indikatif sebesar Rp 27.738.743.000,- (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

BAB V

PENUTUP

Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Bappeda Tahun 2025 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda serta sebagai acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparatur Bappeda. Diharapkan semua aparatur dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan ini akan tergambar dalam laporan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI